

## **BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH**

### **4.1. Permasalahan Pembangunan**

Permasalahan pembangunan daerah merupakan “*gap expectation*” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan *pembangunan* daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu. Identifikasi faktor-faktor tersebut dilakukan terhadap lingkungan internal maupun eksternal dengan mempertimbangkan masukan dari Perangkat Daerah dan *stakeholder* lainnya.

Identifikasi permasalahan pembangunan diuraikan melalui pendekatan aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum yang menggambarkan permasalahan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, atau terhadap beberapa urusan yang dianggap memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap munculnya permasalahan pada bidang urusan lainnya sesuai dengan Undang- Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah . Hal ini dimaksudkan agar dapat dipetakan berbagai permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab penyelenggaraan pemerintahan daerah guna menentukan isu-isu strategis pembangunan jangka menengah daerah.

#### **1. Belum Optimalnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah**

Profesionalitas ASN merupakan kunci keberhasilan ASN dalam melaksanakan fungsinya sebagai pelaksana kebijakan dan pelayanan publik. Upaya mengukur profesionalitas ASN dilakukan berdasarkan Peraturan Menpan RB Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN. IP ASN ini merupakan instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya digunakan untuk penilaian dan evaluasi dalam rangka pengembangan profesionalitas profesi ASN. Indikator pengukuran profesionalitas ASN meliputi 4 (empat) dimensi yaitu: a) Kualifikasi 25%, b) Kompetensi 40%, c) Kinerja 30% dan d) Disiplin 5%. Posisi IP ASN Kota

Jambi pada tahun 2018 sebesar 68, yang berarti berada pada kategori 'Rendah'. Rendahnya profesionalitas ASN ini secara umum disebabkan oleh belum optimalnya dimensi kualifikasi dan kompetensi yang dimiliki ASN. Upaya Pemerintah Kota Jambi untuk meningkatkan indeks tersebut adalah meningkatkan kualifikasi ASN (pendidikan formal/tugas belajar bagi ASN) dan kompetensi (kompetensi teknis, manajerial maupun sosial kultural).

**2. *Masih Tingginya Jumlah Pelanggaran Terhadap PERDA***

Persentase Penurunan tingkat pelanggaran terhadap peraturan daerah dan peraturan Walikota pada tahun awal RPJMD sebesar 82%. Tingginya angka tersebut dikarenakan belum optimalnya sosialisasi terkait perda tersebut dan ketidakpahaman serta kurangnya kesadaran hukum oleh masyarakat terkait perda-perda yang berlaku. Namun dalam hal tersebut pemerintah kota jambi melalui dinas-dinas terkait telah melakukan upaya yang maksimal dalam penegakan perda tersebut.

**3. *Belum Tercapainya respon time penanganan bencana dan penyelamatan***

*Respon time* penanganan bencana dan penyelamatan merupakan salah satu permasalahan di kota jambi. *Respon time* (waktu tanggap) adalah waktu minimal yang diperlukan dimulai saat menerima informasi dari warga/penduduk sampai tiba di tempat kejadian serta langsung melakukan tindakan yang diperlukan secara cepat dan tepat sasaran di Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK). Permasalahan ini terjadi dikarenakan kurangnya armada, posko-posko kendali kebakaran yang belum maksimal, serta masih banyak permukiman yang tidak mampu dilewati oleh armada kebakaran.

**4. *Adanya Potensi Konflik***

Konflik sosial yang dilatarbelakangi oleh pluralitas disumbang dari berbagai wilayah, termasuk Kota Jambi. Kota Jambi berpotensi mendapatkan konflik sosial secara horizontal. Potensi konflik tersebut disumbang dari perbedaan yang ada dalam masyarakat, terutama sengketa pendirian rumah ibadah.

**5. *Masih tingginya angka pelanggaran lalu lintas***

Dengan perkembangan yang terjadi khususnya di Kota Jambi salah

satunya adalah perkembangan lalu lintas. Kita tahu bahwa dengan terjadinya perkembangan lalu lintas maka pasti ada yang namanya masalah yang perlu diatasi oleh pihak siapapun yang ingin bersimpatik termasuk masyarakat dan mahasiswa secara khususnya dan secara luasnya adalah pemerintah yang terkait. Masalah yang benar - benar diperhatikan di kota besar adalah salah satunya masalah lalu lintas termasuk pada pelanggaran lalu lintas yang dilakukan manusia sendiri. Hal tersebut bisa dilihat dari angka kecelakaan lalu lintas yang terus meningkat setiap tahunnya. Perkembangan lalu lintas bisa menyebabkan pengaruh positif maupun negatif bagi kehidupan di lingkungan masyarakat apalagi di daerah yang sudah maju dan berkembang. Setiap tahunnya juga jumlah kendaraan terus meningkat dan tidak sedikit masyarakat yang melanggar peraturan - peraturan lalu lintas sehingga pemerintah maupun kepolisian harus semakin ketat dan tegas untuk masalah lalu lintas, hal tersebut untuk mengurangi atau menekan tingkat kecelakaan lalu lintas.

Kecelakaan lalu lintas dapat disebabkan oleh banyak hal seperti : pengemudi kendaraan yang buruk, bus besar atau kecil yang sembarangan parkir, ketidakteraturan antara transportasi yang besar dan yang kecil atau tidak sesuai dengan luas jalan, pejalan kaki yang kurang hati-hati, jalanan yang tidak layak seperti jalan yang berlubang, kerusakan kendaraan, kendaraan yang sudah tidak layak lagi pakai, pengendara yang tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas, dan masih banyak lagi yang menimbulkan masalah pelanggaran lalu lintas yang telah ditentukan pemerintah khususnya Dinas Perhubungan dan Kepolisian. Pelanggaran lalu lintas termasuk masalah transportasi yang sangat berpengaruh terhadap pelanggaran sosial, karena dapat merugikan beberapa pihak dan kalangan yang berkaitan.

**6. *Minimnya kecepatan tempuh rata - rata (pada saat tertentu)***

Permasalahan Minimnya kecepatan tempuh rata-rata (pada saat tertentu) disebabkan oleh semakin meningkatnya jumlah pertumbuhan populasi, pesatnya tingkat pertumbuhan jumlah dan kepemilikan kendaraan pribadi, urbanisasi dan sistem angkutan umum yang kurang memadai. Pesatnya jumlah kendaraan pribadi yang berada di Kota Jambi terlihat dalam lima tahun terakhir pertumbuhan kendaraan roda dua berdasarkan data pada BPS Kota Jambi mencapai 28,68 persen pertahun dan roda empat 26,42 persen, sehingga menyebabkan meningkatnya volume lalu lintas. Adapun penyebab lainnya yakni dikarenakan

adanya aktivitas parkir di badan jalan. Hal tersebut mengakibatkan bekurangnya kapasitas jalan akibat mengecilnya lebar jalan dengan adanya parkir di badan jalan.

**7. *Rendahnya kualitas lingkungan permukiman***

Persoalan permukiman merupakan masalah yang serius karena dikhawatirkan akan menyebabkan terjadinya kantong-kantong kemiskinan yang fatal dan kemudian menyebabkan lahirnya berbagai persoalan sosial di luar kontrol atau kemampuan pemerintah kota untuk menangani dan mengawasinya. Permukiman kumuh merupakan salah satu masalah sosial di Indonesia yang tidak mudah untuk diatasi. Beragam upaya dan program dilakukan untuk mengatasinya, namun masih saja banyak kita jumpai permukiman masyarakat miskin di hampir setiap sudut kota yang disertai dengan ketidaktertiban dalam hidup bermasyarakat di perkotaan. Misalnya yaitu, pendirian rumah maupun kios dagang secara liar di lahan-lahan pinggir jalan sehingga mengganggu ketertiban lalu lintas yang akhirnya menimbulkan kemacetan jalanan kota. Masyarakat miskin di perkotaan itu unik dengan berbagai problematika sosialnya sehingga perlu mengupas akar masalah dan merumuskan solusi terbaik bagi kesejahteraan mereka. Dapat dijelaskan bahwa bukanlah kemauan mereka untuk menjadi sumber masalah bagi kota namun karena faktor-faktor ketidakberdayaanlah yang membuat mereka terpaksa menjadi ancaman bagi eksistensi kota yang mensejahterahkan.

Keluhan yang paling sering disampaikan mengenai permukiman masyarakat miskin tersebut adalah rendahnya kualitas lingkungan yang dianggap sebagai bagian kota yang mesti disingkirkan. Terbentuknya permukiman kumuh, yang sering disebut sebagai *slum area* sering dipandang potensial menimbulkan banyak masalah perkotaan.

**8. *Masih banyaknya masyarakat yang belum memiliki rumah layak huni***

Rumah termasuk kebutuhan pokok di dalam urutan prioritas kebutuhan manusia/ masyarakat. Setiap bagian dari rumah berperan dan saling berkaitan untuk bersama-sama memenuhi fungsi sebenarnya sesuai kebutuhan penghuninya. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman bahwa dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, setiap orang berhak menempati, menikmati, dan/ atau memiliki/ memperoleh rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman,

serasi, dan teratur. Pemerintah beranggapan bahwa masalah perumahan merupakan tanggung jawab bersama, namun kewajiban untuk pemenuhan kebutuhan rumah tersebut pada hakekatnya merupakan tanggung jawab individual dalam hal ini dilaksanakan secara swadaya oleh masing-masing rumah tangga. Oleh karenanya berbagai upaya perlu dilakukan untuk meningkatkan prakarsa dan swadaya masyarakat dalam mewujudkan Rumah Layak Huni.

Pengentasan kemiskinan telah menjadi agenda dan prioritas utama pembangunan Nasional. Upaya penanggulangan kemiskinan telah dilakukan pemerintah pusat maupun daerah. Berbagai strategi, kebijakan, program dan kegiatan pengentasan kemiskinan telah dirancang dan dilaksanakan. Salah satu program adalah program Pemugaran rumah tidak layak huni (RTLH) Masih rendahnya kualitas dan kuantitas pelayanan air bersih dan air limbah

Pemenuhan layanan air bersih dan air limbah pada masyarakat perkotaan merupakan kebutuhan dasar yang akan berkaitan langsung kepada derajat kesehatan masyarakat yang pada gilirannya akan mendorong terwujudnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang kompetitif. Saat ini cakupan layanan air minum Jambi baru mencapai 77% atau masih ada 23% masyarakat yang masih memanfaatkan air tanah atau sumber lainnya, sedangkan untuk layanan air limbah saat ini baru mencapai 0,39% yang mencapai akses sanitasi layak berdasarkan SNI. Hal ini tercermin dari masih banyaknya tanki septic yang digunakan masyarakat Kota Jambi tidak kedap air dan relative jarang disedot secara berkala. sedangkan untuk air minum perluasan jaringan masih terkendala dengan usia pipa asbes yang tidak mampu dialiri dengan tekanan relative tinggi untuk daerah yang jauh dan relative tinggi secara topografi (bagian selatan Kota Jambi). Untuk itu kedepan Pemerintah Kota Jambi merencanakan akselerasi perluasan layanan air limbah melalui pembangunan IPAL terpusat dan peningkatan sistem pengangkutan dan pengolahan setempat. Sedangkan untuk memperluas cakupan dan peningkatan kualitas layanan air minum pemerintah kota jambi akan berupaya melakukan peremajaan jaringan dan penguatan sistem produksi maupun distribusi.

#### **9. *Rendahnya Aksesibilitas dan Kapabilitas Infrastruktur Jalan***

Penanganan jalan di Kota Jambi di bagi atas dua fokus, yaitu jalan status kota dan jalan non status atau yang dikenal sebagai jalan lingkungan. Untuk kondisi jalan status kota relative dalam kondisi cukup baik yaitu mencapai 86,32%,

namun demikian kondisi ini masih memerlukan peningkatan kapasitas, disamping meningkatkan kualitas jalan dalam kondisi baik, jalan perkotaan masih memerlukan pelebaran- pelebaran untuk mengantisipasi jumlah kendaraan yang bertambah seiring kemajuan kota. Sedangkan untuk penanganan jalan lingkungan juga diperlukan mengingat perkembangan pesat beberapa pusat-pusat pemukiman dan kegiatan di Kota Jambi sebagai *trigger* sebaran pengembangan kawasan.

#### **10. *Banyaknya titik genangan/banjir di Kota Jambi***

Pesatnya pembangunan Kota Jambi dalam beberapa tahun terakhir tentunya tidak hanya menimbulkan dampak positif, tetapi juga berdampak langsung pada menurunnya kemampuan drainase perkotaan menerima debit air yang masuk ke drainase yang tidak lagi terserap alami kedalam tanah akibat ruang yang terbangun. Hal ini diperparah dengan kondisi cuaca ekstrem yang mengakibatkan curah hujan lebih tinggi dalam beberapa waktu terakhir. Kondisi tersebut menjadi faktor penyebab terjadinya 19 titik genangan di Kota Jambi. Untuk itu kedepan Kota Jambi akan melakukan langkah-langkah penangan yang komprehensif untuk mengatasi persoalan tersebut dimulai dari peningkatan kerjasama penanganan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan stake holder lainnya hingga kedalam rekayasa teknis untuk mengendalikan debit air yang ditampung dalam drainase perkotaan hingga peningkatan pengawasan pemanfaatan ruang kota.

#### **11. *Belum terwujudnya harmonisasi ruang kota***

Ruang Kota yang harmonis tentunya merupakan harapan dari setiap masyarakat perkotaan. Sebuah kota yang nyaman untuk ditempati, mendukung aktifitas ekonomi serta mampu menginspirasi setiap orang yang datang merupakan impian dari banyak kota di dunia. Sebelum menuju titik tersebut, tentunya kota tersebut harus terbebas dari segala macam persoalan seperti banjir, titik kemacetan, kualitas udara hingga ke persoalan batas-batas wilayah administrative yang memang merupakan persoalan yang berkaitan erat dengan penataan dan pemanfaatan ruang kota. Untuk itu diperlukan penguatan komitmen Pemerintah Kota Jambi dalam peningkatan kualitas perencanaan tata ruang melalui regulasi, control pemanfaatan ruang serta pengawasan terhadap pelanggaran- pelanggaran tata ruang yang melibatkan setiap lapisan aparatur

Pemerintahan.

## 12. Rendahnya rasio RTH publik

**Tabel 4.1.**  
Rasio Ruang Terbuka Hijau di Kota Jambi Tahun 2012-2018

| Uraian          | Tahun    |          |          |          |          |          |          |
|-----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|                 | 2012     | 2013     | 2014     | 2015     | 2016     | 2017     | 2018     |
| Luas Kota Jambi | 17.533   | 17.533   | 17.533   | 17.533   | 17.533   | 17.533   | 17.533   |
| Luas RTH (Ha)   | 1.175,40 | 1.193,72 | 1.212,05 | 1.272,14 | 1.290,47 | 1.609,53 | 1.844,47 |
| Ratio RTH (%)   | 6.70     | 6.81     | 6.91     | 7.26     | 7.36     | 9.18     | 10.52    |

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, 2018.

Tingginya harga dan terbatasnya lahan merupakan tantangan bagi Pemerintah Kota Jambi dalam mencapai target perluasan, pengembangan dan perlindungan terhadap Ruang Terbuka Hijau (RTH). Sebagaimana tergambar pada tabel di atas rasio RTH di Kota Jambi pada Tahun 2018 baru mencapai 10,52% atau seluas 1.844,47 ha. Hal ini tentunya masih jauh dari arahan yang diamanatkan di dalam Undang-Undang Penataan Ruang, yaitu RTH publik 20% dan Privat 10% dari luasan wilayah.

Upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Jambi adalah melakukan pendataan RTH publik dan privat yang terdigitasi dengan baik untuk mendapatkan data yang lebih valid dan terkini. Perluasan RTH publik direncanakan dengan terus melaksanakan “*land banking*” setiap tahunnya, untuk kepentingan prasarana dan sarana umum. Pemanfaatan lahan pekarangan, ruang terbuka pada bangunan dan lingkungan, serta lahan-lahan publik yang masih tersedia untuk meningkatkan tutupan lahan, dengan penanaman vegetasi tanaman dan pohon yang berdaun lebat dan berimplikasi pada volume tutupan lahan.

Indeks kinerja tutupan lahan sangat mempengaruhi indeks kualitas udara dan air pada kinerja lingkungan hidup Kota Jambi. Oleh karenanya, mewujudkan rasio ruang terbuka hijau dan indeks kinerja tutupan lahan akan menjadi tantangan dan permasalahan pembangunan perkotaan Kota Jambi yang berkelanjutan.

## 13. Belum optimalnya manajemen pengelolaan sampah

Penanganan sampah selama 5 Tahun terakhir mengalami peningkatan dengan asumsi volume timbulan sampah sebesar 2,5 lt/orang/hari. Volume sampah yang masuk ke TPA Talang Gulo sama dengan volume sampah terangkut, rata-rata pada Tahun 2017 sebesar 163 Ton/hari.

**Tabel 4.2.**  
**Persentase Penanganan Sampah Kota Jambi**

| No | Indikator Kinerja                               | Tahun   |         |         |         |         |
|----|---|---------|---------|---------|---------|---------|
|    |   | 2017    | 2018    | 2019    | 2020    | 2021    |
| 1. | Jumlah Sampah yang ditangani                    | 410.260 | 438.520 | 454.148 | 459.891 | 571,222 |
| 2. | Volume Produksi Sampah                          | 560.037 | 566.594 | 574.072 | 581.326 | 587,254 |
| 3. | Persentase Penanganan Sampah (%)                | 73,26   | 77,35   | 79,11   | 79,11   | 75,27   |
| 4. | Jumlah TPS                                      | 455     | 445     | 445     | 445     | 445     |
| 5. | Jumlah Daya Tampung TPS (m <sup>3</sup> /hari)  | 1.018   | 1.018   | 1.018   | 1.018   | 1.018   |
| 6. | Jumlah Penduduk                                 | 591.134 | 597.043 | 604.923 | 611.353 | 618,814 |
| 7. | Rasio Daya Tampung TPS terhadap Jumlah Penduduk | 0,17    | 0,17    | 0,17    | 0,17    | 0,17    |

*Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, 2022*

Di dalam manajemen pengelolaan persampahan, terdapat pola perlakuan terhadap sampah yaitu dari pewadahan, pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan mobilisasi, pengolahan dan pemrosesan akhir. Saat ini, cakupan penanganan persampahan di Kota Jambi telah mencapai penanganan 75,27% dari keseluruhan cakupan pelayanan. Cakupan pelayanan pengelolaan persampahan tidak saja ditekankan pada penanganan, akan tetapi juga pada pengurangan sampah di titik sumber atau rumah tangga. Hingga akhir tahun 2021, perlakukan pengurangan sampah di titik sumber atau rumah tangga, dengan mendorong berfungsi secara aktif sebanyak 445 jumlah TPS.

Pemerintah Kota Jambi telah merumuskan Kebijakan Strategis Daerah Pengelolaan Persampahan, dengan meningkatkan target pengurangan sampah di tingkat rumah tangga hingga 30% pada akhir tahun 2030, serta mengoptimalkan penanganan sampah yang terpilah, modern dan berkelanjutan. Hal ini adalah pekerjaan rumah yang besar dalam mengoptimalkan pelayanan dan utilitas perkotaan di bidang persampahan. Tekanan pembangunan yang berdampak pada peningkatan luasan kawasan terbangun dan timbulan sampah, membutuhkan pengelolaan persampahan yang efektif.

Tidak saja pada pengelolaan terhadap limbah atau sampah yang bersumber dari rumah tangga, Pemerintah Kota Jambi juga mempunyai potensi permasalahan yang timbul dari timbulan limbah B3 di Kota Jambi yang terus meningkat, seiring pertumbuhan aktifitas ekonomi dan industri.



## 14. Menurunnya kualitas Lingkungan Hidup

Kecenderungan penurunan kualitas lingkungan hidup di Kota Jambi ditunjukkan oleh Indeks Kinerja Lingkungan Hidup yang terdiri dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL). Cukup signifikan penurunan IKLH Kota Jambi rata-rata selama 5 Tahun terakhir yaitu 0,64 poin tiap tahunnya. Penurunan kualitas air dan udara di Kota Jambi menunjukkan perkembangan dan pertumbuhan kota, serta tekanannya terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup Kota Jambi. Tekanan terhadap kualitas lingkungan hidup oleh pembangunan perkotaan dapat diantisipasi dengan perencanaan pembangunan yang berkelanjutan, sesuai kaidah tata ruang, serta komitmen penuh dari seluruh stakeholder untuk tetap melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Kota Jambi dalam setiap aktifitas sosial, budaya dan ekonominya.

Pemerintah Kota Jambi telah berupaya merumuskan kebijakan dan implementasinya untuk tetap menjaga perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kota Jambi. Peningkatan IKTL melalui penanaman vegetasi hijau pada median jalan, pedestrian, fasilitas publik yang telah diserahkan kepada pemerintah, dan bahkan pada ruang terbuka hijau yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah Kota Jambi. Akan tetapi, tekanan terhadap kualitas air dan udara tetap mendorong IKLH Kota Jambi mengalami penurunan hingga pada titik 50,31 poin, jauh di bawah batas ambang bawah (threshold index) skala nasional 66,46 poin, dalam kategori cukup.

**Tabel 4.3.**  
Indikator Kualitas Air, Udara dan Tutupan Lahan Kota Jambi  
Tahun 2013 – 2017

| No | Indikator Kinerja     | Tahun |       |       |       |       |       |       |       |       |
|----|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|    |                       | 2013  | 2014  | 2015  | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  |
| 1. | Indeks Kualitas Air   | 46.39 | 46.32 | 46.05 | 45.79 | 39.41 | 32.11 | 38.27 | 43.32 | 43.99 |
| 2. | Indeks Kualitas Udara | 99.08 | 96.48 | 95.33 | 93.05 | 83    | 80.68 | 76.84 | 84.51 | 85.02 |
| 3. | Indeks Tutupan Lahan  | n/a   | 25.14 | 26.84 | 27.77 | 27.77 | 39.33 | 44.81 | 44.82 | 49.91 |

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, 2021

Indeks Tutupan Lahan (ITL) Kota Jambi pada tahun 2021 sebesar 49,91, sehingga dapat dihitung Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kota Jambi pada tahun 2017 dan 2021 adalah sebagai berikut:

|           |   |             |   |             |   |             |         |
|-----------|---|-------------|---|-------------|---|-------------|---------|
| IKLH      | = | (IKAx30%)   | + | (IKUx30%)   | + | (ITLX40%)   |         |
| IKLH 2017 | = | (30,78x30%) | + | (83,00x30%) | + | (27,77x40%) | = 45,24 |
| IKLH 2021 | = | (43,99x30%) | + | (85,02x30%) | + | (49,91x40%) | = 58,67 |

IKLH Kota Jambi mengalami peningkatan indeks tahun 2017 ke tahun 2021 yaitu 45,24 menjadi 58,67.

## 15. *Lemahnya tata niaga perdagangan*

Permasalahan lemahnya tata niaga perdagangan disebabkan antara lain kurangnya koordinasi antar Instansi Pemerintah terkait distribusi perdagangan, pembangunan atau revitalisasi Sarana dan prasarana perdagangan sebaiknya berdasarkan SNI, kondisi saat ini Kota Jambi memiliki pasar daerah sebanyak 21 unit yang terdiri dari 7 unit pasar tradisional/rakyat dan 14 unit pasar tematik, idealnya untuk Kecamatan terdapat 1 pasar rakyat, juga belum meratanya perlindungan terhadap konsumen dan pelaku usaha dalam hal tera/tera ulang.

## 16. *Belum optimalnya pengendalian ketersediaan dan distribusi pangan*

Kecukupan ketersediaan pangan strategis di Kota Jambi sudah cukup memadai secara kemandirian, situasi kemandirian pangan di Kota Jambi Tahun 2017 adalah: dari segi ketersediaan Energi Kota Jambi terpenuhi sebesar 2.459 kkal/kap/hari (103,9% AKE) dari angka kecukupan energi yang seharusnya dipenuhi sebesar 2.400 kkal/kap/hari; dari segi ketersediaan Protein Kota Jambi terpenuhi sebesar 63,57 gr/kap/hari (109% AKP) dari angka kecukupan protein yang seharusnya dipenuhi sebesar 63 gr/kap/hari; dari segi ketersediaan Lemak Kota Jambi terpenuhi sebesar 59,12 gr/kap/hari (124% AKL) dari angka kecukupan lemak yang seharusnya dipenuhi sebesar 47,34 gr/kap/hari, dan skor PPH 89,70.

Kendati demikian, perubahan masa tanam dan panen yang disebabkan oleh perubahan iklim dan cuaca, saat ini sangat berdampak pada kelangkaan bahan pangan pada bulan-bulan tertentu. Demikian pula perlunya kesiapan Pemerintah Kota Jambi untuk mengantisipasi kelangkaan bahan pangan ini agar tidak terjadi lonjakan harga pangan (Volatile Food), yang akan berdampak pada inflasi bahan pangan.

Berkaitan dengan kualitas/keamanan pangan segar, pemerintah Kota Jambi secara rutin melakukan pengecekan sampel bahan pangan segar dan kemasan agar dapat dikonsumsi secara aman oleh masyarakat, namun belum dapat menjangkau seluruh kalangan masyarakat.

**Tabel 4.4.**  
Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi Pangan Kota Jambi Tahun 2020

| Kelompok Pangan     | Berat Pangan Gram /Kapita/ Hari | Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) |       |       |       |             |          |           |          |
|---------------------|---------------------------------|--|-------|-------|-------|-------------|----------|-----------|----------|
|                     |                                 | Kkal /Kapita                               | %     | %AKE  | Bobot | Skor Aktual | Skor AKE | Skor Maks | Skor PPH |
| Padi-padian         | 271,5                           | 1.141,3                                    | 51,9  | 53,1  | 0,5   | 26,0        | 26,5     | 25,0      | 25,0     |
| Umbi-umbian         | 42,2                            | 97,6                                       | 4,4   | 4,5   | 0,5   | 2,2         | 2,3      | 2,5       | 2,3      |
| Pangan Hewani       | 35,0                            | 300,5                                      | 13,7  | 14,0  | 2,0   | 27,3        | 28,0     | 24,0      | 24,0     |
| Minyak dan Lemak    | 24,7                            | 218,9                                      | 10,0  | 10,2  | 0,5   | 5,0         | 5,1      | 5,0       | 5,0      |
| Buah/Biji Berminyak | 82,2                            | 27,9                                       | 1,3   | 1,3   | 0,5   | 0,6         | 0,6      | 1,0       | 0,6      |
| Kacang-kacangan     | 21                              | 73,2                                       | 3,3   | 3,4   | 2,0   | 6,7         | 6,8      | 10,0      | 6,8      |
| Gula                | 30,9                            | 107,3                                      | 4,9   | 5,0   | 0,5   | 2,4         | 2,5      | 2,5       | 2,5      |
| Sayur dan Buah      | 317,3                           | 108,7                                      | 4,9   | 5,1   | 5,0   | 24,7        | 25,3     | 30,0      | 25,3     |
| Lain-lain           | 42,4                            | 122,6                                      | 5,6   | 5,7   | 0,0   | 0,0         | 0,0      | 0,0       | 0,0      |
| Total               |                                 | 2198,0                                     | 100,0 | 102,2 | 11,5  | 95          | 97,1     | 100       | 91,5     |

Sumber: Dinas Pertanian & Ketahanan Pangan Kota Jambi, 2022

Berdasarkan hasil analisis konsumsi tahun 2020, PPH Kota Jambi sudah mencapai nilai optimal, yaitu telah mencapai 91,50 dimana nilainya telah berada di atas nilai skor PPH ideal minimal 90, hal ini berarti telah beragamnya konsumsi pangan oleh masyarakat Kota Jambi dimana skornya telah melebihi skor ideal 1 selain konsumsi Buah/Biji berminyak dengan skor 0,6.

## 17. Rendahnya kemandirian daerah terhadap dana perimbangan

Komponen pendapatan daerah terdiri dari 3 (tiga) komponen besar, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain -lain Pendapatan Daerah yang Sah. APBD Kota Jambi beberapa tahun terakhir selalu berada di atas angka 1,6 Triliun. Dari total APBD Kota Jambi, sebagian besar masih didominasi oleh Dana Perimbangan, baik itu Dana Alokasi Umum (DAU) maupun Dana Alokasi Khusus (DAK). Jika dilihat dari proporsi secara persentase, Dana

Perimbangan menempati perentase tertinggi diikuti oleh PAD dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Kemandirian daerah dapat dilihat dari seberapa besar daerah tersebut bisa membiayai APBD dari PAD. Beberapa tahun terakhir, rata-rata PAD Kota Jambi berkisar diantara angka 18%-26% dari total APBD Kota Jambi. Namun demikian, Pemerintah Kota Jambi selalu berkomitmen untuk meningkatkan PAD dari tahun ke tahun dengan mengupayakan intensifikasi maupun ekstensifikasi dan juga bekerjasama dengan berbagai pihak dan memanfaatkan teknologi, hal ini dapat dilihat dari target dan realiasi PAD yang selalu meningkat dari tahun-tahun sebelumnya.

**18. Rendahnya daya saing tenaga kerja**

Meningkatnya jumlah angkatan kerja yang tidak tertampung dalam lapangan kerja menyebabkan tingginya tingkat pengangguran. Hal ini secara umum disebabkan oleh beberapa hal seperti terjadinya *mismatch* dalam pasar kerja dan rendahnya skill tenaga kerja, kondisi ini dapat menjadi beban bagi pemerintah Kota Jambi. Jumlah dan komposisi tenaga kerja akan terus mengalami perubahan seiring dengan berlangsungnya proses demografi. Indikasi tentang penduduk usia kerja yang termasuk dalam kelompok pengangguran diukur dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), di mana TPT merupakan persentase jumlah penganggur terhadap jumlah angkatan kerja. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Jambi pada tahun 2021 sebesar 10.66 persen. Oleh karena itu perlu dikembangkan jenis pendidikan dan pelatihan bagi tenaga kerja yang sesuai kebutuhan tenaga kerja, pelaksanaan *job fair* dan peningkatan perlindungan terhadap tenaga kerja.

**19. Tingginya penduduk yang terpapar penyakit menular dan tidak menular**

Secara umum derajat kesehatan masyarakat Kota Jambi telah menunjukkan hasil yang menggembirakan. Namun demikian masih ditemukan beberapa permasalahan yang perlu penyelesaian dan mendapat perhatian semua pemangku kepentingan antara lain: masih tingginya angka kesakitan penyakit menular dan tidak menular, masih adanya angka kematian ibu dan anak, keterbatasan mutu tenaga kesehatan, serta penyebarannya yang kurang merata, pelayanan pada rumah sakit dan puskesmas juga masih perlu ditingkatkan kualitasnya, belum optimalnya pelaksanaan sistem pelayanan kesehatan, masih ditemukannya balita gizi kurang serta baduta *stunting*. Penyelenggaraan kesehatan di Kota Jambi dikembangkan dengan mendorong promosi kesehatan

untuk meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap kesehatan lingkungan dan perorangan, optimalisasi sistem jaminan pelayanan kesehatan bagi warga Kota Jambi khususnya keluarga kurang mampu, penerapan ISO pada fasilitas kesehatan, penyempurnaan sistem rujukan, optimalisasi kegawat darurat, peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana kesehatan..

**20. *Belum optimalnya daya saing pendidikan***

Pendidikan merupakan prasyarat utama untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan daya saing daerah di tingkat global. Oleh karena itu penyelenggaraan pendidikan menjadi perhatian semua pemangku kepentingan baik pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat. Permasalahan pendidikan di Kota Jambi adalah belum optimalnya akses dan mutu pendidikan yang ditandai dengan masih rendahnya daya tampung siswa terutama ditingkat Sekolah Menengah Pertama Negeri, masih banyaknya prasarana dan sarana pendidikan dasar yang perlu diperbaiki, belum meratanya penyebaran guru, masih rendahnya kualitas dan kuantitas guru dan masih rendahnya kualitas siswa.

Penyelenggaraan pendidikan di Kota Jambi dikembangkan untuk mendorong peningkatan daya saing global, dengan meningkatkan akses dan mutu pendidikan melalui penyediaan prasarana dan sarana pendidikan yang berstandar nasional, mengembangkan metode dan sistem mengajar yang efektif dan berdampak pada kualitas dan pembentukan karakter siswa.

**21. *Belum optimalnya peran serta perempuan di dalam pembangunan***

Perempuan adalah sumber daya manusia yang jumlahnya besar dan memiliki potensi yang tinggi dalam kaitannya sebagai subyek dan obyek pembangunan. Sebagai bagian terbesar dari sumber daya manusia, perempuan memiliki peran strategis dalam kehidupan. Peran penting tersebut tercermin dalam segala aspek kehidupan baik dalam keluarga, masyarakat bahwa negara. Dalam berbagai kajian telah banyak dipaparkan bahwa perempuan adalah *agent of development* sebagai aset bangsa yang potensial, dan perannya sebagai kontributor sangat dibutuhkan dalam pembangunan bangsa. Meskipun saat ini upaya untuk meningkatkan peran dan kualitas perempuan dalam pembangunan telah banyak dikembangkan, akan tetapi kesenjangan gender masih terjadi diberbagai lini bagi perempuan dibandingkan dengan laki-laki.

Persoalan paling penting yang menghalangi upaya peningkatan kualitas

hidup perempuan adalah pendekatan pembangunan yang mengabaikan isu tentang kesetaraan dan keadilan gender. Kesetaraan gender, atau kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, mengacu pada kesetaraan hak, tanggung jawab, kesempatan, perlakuan dan penilaian atas perempuan dan laki-laki dalam kehidupan maupun di tempat kerja. Berdasarkan data survey angkatan kerja nasional (sakernas) tahun 2013- 2016 jumlah angkatan kerja perempuan sebesar 46,69% atau 89.061 jiwa dari jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan sebanyak 213.694 jiwa. Jika ditinjau dari jumlah angkatan kerja perempuan menunjukkan belum optimalnya peran serta perempuan dalam pembangunan di Kota Jambi sehingga perlu adanya langkah-langkah konkrit untuk meningkatkan peran serta perempuan dalam mendukung pembangunan.

## **22. *Tingginya kasus kejahatan anak***

Masa depan anak adalah harapan dan impian yang harus diwujudkan yaitu mewujudkan impian anak Indonesia khususnya anak-anak di kota Jambi agar menjadi anak yang cerdas, berahlak mulia, aktif berpartisipasi serta memiliki jiwa nasionalisme dan semangat patriotisme yang kuat. Anak juga merupakan karunia tuhan yang maha kuasa, ini merupakan potensi kekayaan dan kesejahteraan bangsa dimasa depan, anak adalah investasi dan anak juga generasi penerus bangsa yang perlu dilindungi agar hidup, tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang layak dan pewaris masa depan. Akan tetapi tindak kekerasan atau kasus kejahatan terhadap anak setiap tahunnya meningkat, baik itu dilakukan dilingkungan keluarga maupun diluar dari keluarga. Dimana berdasarkan data yang masuk dinas pemberdayaan masyarakat perempuan dan perlindungan anak dari tahun 2015 hingga 2017 terdapat 124 kasus kekerasan terhadap anak-anak. Dari kasus tersebut tidak hanya kekerasan terhadap fisik maupun psikis tapi juga kekerasan seksual dan penelantaran. Faktor dari pemicu dari kekerasan anak diantaranya faktor ekonomi, teknologi informasi dan pergaulan lingkungan yang baik. Melihat dari kasus tersebut perlu dilakukan langkah-langkah percepatan dalam upaya sosialisasi yang efektif guna dapat menurunkan kasus kejahatan terhadap anak-anak.

## **23. *Belum optimalnya peran serta kepemudaan dalam pembangunan***

Pada tahun 2009 pemerintah mengeluarkan Undang-undang nomor 40 tahun 2009 tentang kepemudaan, hal ini lebih menegaskan perhatian pemerintah

terhadap pemuda, inti dari undang-undang tersebut adalah untuk pengembangan dan pemberdayaan pemuda oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah disegala bidang.

Namun minat pemuda dikota jambi masih rendah terhadap pengembangan bidang kewirausahaan, Terbatasnya sarana dan prasarana yang dapat memfasilitasi pemuda untuk berpartisipasi dalam pengembangan kepemudaan dan olahraga ataupun belum optimalnya fasilitas untuk pemuda menuangkan kreatifitasnya.

## 24. *Tingginya Angka Penyandang PMKS*

Sesuai dengan amanat UU nomor 11 tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial diantaranya melalui jaminan sosial dan perlindungan sosial. Jaminan sosial bertujuan menjamin PMKS yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial ekonomi agar kebutuhan dasarnya terpenuhi. Didalam PMKS sendiri terdapat 26 indikator yang harus ditangani, namun dapat disesuaikan dengan kondisi daerah tersebut. Untuk kota jambi sendiri terdapat 23 indikator dari 26 indikator yang ada, dilihat secara trend selama 3 (tiga) tahun PMKS kota jambi menunjukkan peningkatan diantaranya: anak terlantar meningkat sebesar 25,4%, anak nakal yang berhadapan dengan hukum meningkat sebesar 200%, tuna susila juga meningkat dari tahun 2015 hingga 2017 sebesar 131,4%. Jika ditinjau dari aspek penyelenggaraan pemerintah bahwasanya program dan kegiatan terutama pada PMKS belum optimal sehingga ini menjadi tugas dari pemerintah Kota Jambi untuk dapat menyusun langkah-langkah dan strategi dalam upaya menurunkan anak Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.

| No | JENIS PMKS  | TAHUN |       |       |
|----|---|-------|-------|-------|
|    |   | 2015  | 2016  | 2017  |
| 1  | Anak balita Terlantar   | -     | -     | -     |
| 2  | Anak Terlantar  | 165   | 180   | 207   |
| 3  | Anak Nakal yang Berhadapan dengan Hukum                           | 17    | 25    | 51    |
| 4  | Anak Jalanan  | 52    | 18    | 51    |
| 5  | Anak dengan Kedisabilitas   | 506   | 506   | 506   |
| 6  | Anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah | -     | 39    | 46    |
| 7  | Anak yang memerlukan perlindungan khusus                          | -     | -     | -     |
| 8  | Lanjut usia terlantar   | 8.001 | 8.246 | 8.462 |
| 9  | Penyandang disabilitas  | 1.558 | 1.841 | 1.533 |
| 10 | Tuna susila   | 270   | 110   | 625   |
| 11 | Gelandangan   | 196   | 141   | 161   |
| 12 | Pengemis  | 28    | 28    | 79    |

| No            | JENIS PMKS                                 | TAHUN         |               |               |
|---------------|--|---------------|---------------|---------------|
|               |  | 2015          | 2016          | 2017          |
| 13            | Pemulung                                   | -             | -             | 55            |
| 14            | Bekas warga binaan lembaga permasyarakatan | -             | -             | 54            |
| 15            | Orang dengan HIV/AIDS (OOHA)               | 395           | 395           | 395           |
| 16            | Korban penyalahgunaan napza                | 110           | 450           | 395           |
| 17            | Korban trafficking                         | -             | 1             | -             |
| 18            | Korban tindak kekerasan                    | -             | 20            | 21            |
| 19            | Korban bencana alam                        | 1.209         | 672           | 1.487         |
| 20            | Korban bencana sosial                      | 116           | 120           | 258           |
| 21            | Perempuan rawan sosial ekonomi             | 102           | 150           | 45            |
| 22            | Fakir miskin                               | 31.707        | 31.707        | 26.751        |
| 23            | Keluarga bermasalah sosial psikologis      | 6.423         | 8.906         | 8.564         |
| <b>Jumlah</b> |  | <b>50.555</b> | <b>53.555</b> | <b>49.757</b> |

Sumber: Dinas Sosial Kota Jambi, 2018

Sementara itu perlindungan sosial dimaksud untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok dan atau masyarakat agar keberlangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai kebutuhan dasar minimal. Tahun 2017 ditetapkan sebanyak 31.707 orang PMKS memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan dasar, untuk mencapai target tersebut dilaksanakan kegiatan peningkatan dan pembinaan pelayanan PMKS yang didalamnya terdiri dari rangkaian sub kegiatan pelayanan pemberdayaan lanjut usia. Dari target yang ditetapkan baru dapat direalisasikan sebesar 26.751 orang PMKS (84,4%). Disamping itu selain memberikan bantuan kebutuhan dasar Pemerintah Kota Jambi dalam hal ini dinas sosial juga memberikan sosialisasi dan pelatihan-pelatihan kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial seperti pelatihan kuliner dan bantuan bagi kelompok usaha bersama (KUBE), dll, sesuai dengan ketrampilan masing-masing. Berdasarkan data jumlah populasi penanganan PMKS meningkat 4.340 atau 69,8% dari tahun 2013 sebesar 6.229 orang menjadi 10.569 orang pada tahun 2017, sementara jumlah PMKS yang ditangani hanya sebesar 70% dari tahun 2013 hingga 2017. Kenaikan terjadi pada tahun 2017 yang mencapai 80%. Salah satu tidak tercapainya target penanganan ialah keterbatasan anggaran dan tinggi partisipasi masyarakat PMKS yang ingin mendapatkan kegiatan tersebut.

## 25. Optimalisasi Penanganan dan pencegahan penularan Pandemi Covid-19

Dalam 2 tahun terakhir ini Pemerintah Kota Jambi telah melakukan secara maksimal dalam penanganan dan pencegahan Pandemi covid-19 namun tidak menutup kemungkinan masih terdapat beberapa masalah yang ditemui, masalah tersebut antara lain: masih kurangnya ruang pelayanan khusus untuk pasien



Covid 19, terbatasnya tenaga kesehatan dan sarana parasana dalam penanganan pasien.

## **26. Pemulihan Dampak Sosial dan Ekonomi Akibat Pandemi Covid 19**

Dalam pola dan kondisi normal, kebijakan ekonomi daerah di Kota Jambi untuk tahun 2020 dan 2021 diarahkan dalam rangka pencapaian daya saing daerah yang tangguh. Pencapaian daya saing daerah yang tangguh dimaknai sebagai upaya meningkatkan percepatan pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi, yang kemudian mempunyai dampak *multiplier* terhadap penurunan kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan pendapatan serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan dan implementasinya di prioritaskan melalui pengembangan produk unggulan lokal Kota Jambi yang komparatif dan kompetitif. Berbasis pertumbuhan ekonomi lima tahun terakhir (2015-2019), bahkan tahun 2019 mampu tumbuh 7,79 persen, sehingga diperkirakan ekonomi Kota Jambi akan tumbuh sekitar 8,8 persen tahun 2020 dan 2021 di proyeksi menjadi 9,02 persen.

Akan tetapi persoalan Pandemi Covid 19 telah membuat perubahan dalam perekonomian Kota Jambi, sehingga beberapa sektor unggulan di Kota Jambi tidak bergerak dengan baik terutama sektor perdagangan besar, eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; pengadaan listrik dan gas dan industri pengolahan, kemudian sektor informal yang masih menjadi motor penggerak perekonomian menjadi tidak berjalan, karena semakin diperketatnya kebijakan social dan physical distancing. Apalagi jika Kota Jambi ditetapkan sebagai wilayah PSBB dan zona merah; dan semakin menurunnya permintaan konsumen luar wilayah Jambi terhadap produk Jambi. Hal tersebut berdampak kepada meningkatnya angka kemiskinan dan pengangguran di Kota Jambi.

| NO | URUSAN                            | AKAR MASALAH   | MASALAH POKOK   | OPD    |
|----|-----------------------------------|--|---|--------|
| 1. | Pendidikan                        | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rendahnya kualitas daya saing siswa;</li> <li>2. Rendahnya daya tampung sekolah;</li> <li>3. Rendahnya kualitas lulusan yang dapat diterima di SMA favorit;</li> <li>4. Kurangnya sarana dan prasarana pendidikan;</li> <li>5. Rendahnya kompetensi tenaga pendidik;</li> <li>6. Tidak optimalnya penerapan Kurikulum K13;</li> <li>7. Distribusi tenaga pendidik tidak merata.</li> </ol>   | Belum optimalnya daya saing pendidikan  | DISDIK |
| 2. | Kesehatan                         | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rendahnya kualitas kesehatan masyarakat;</li> <li>2. Tingginya penduduk yang terpapar penyakit menular;</li> <li>3. Rendahnya sapras pelayanan kesehatan dasar;</li> <li>4. Rendahnya kualitas tenaga kesehatan;</li> <li>5. Masih kurangnya Alat kesehatan;</li> <li>6. Tingginya Masyarakat dengan pola hidup tidak sehat.</li> </ol>  | Tingginya penduduk yang terpapar penyakit menular dan tidak menular   | DINKES |
| 3. | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Banyaknya titik genangan dan banjir di Kota Jambi;</li> <li>2. Tingginya alih fungsi retensi alami;</li> <li>3. Belum terintegrasinya sistem jaringan drainase;</li> <li>4. Rendahnya pengawasan dan perlindungan sumber daya air;</li> <li>5. Masih tingginya sedimentasi pada saluran;</li> <li>6. Banyaknya timbulan sampah yang menyumbat drainase;</li> <li>7. Banyaknya timbunan sampah di pinggir jalan dan lingkungan</li> <li>8. Pengolahan sampah yang tidak terpadu</li> <li>9. Belum meratanya pembangunan saluran drainase;</li> <li>10. Ketidaksesuaian dimensi drainase dengan debit air;</li> <li>11. Belum adanya regulasi yang mengatur secara mendetail (RDTR);</li> <li>12. Lemahnya pengawasan pembangunan bangunan;</li> <li>13. Masih banyaknya bangunan liar dan tidak sesuai spesifikasi;</li> <li>14. Terjadinya degradasi kawasan strategis;</li> <li>15. Kurangnya penataan dan perlindungan bangunan dan kawasan cagar budaya;</li> <li>16. Kurang representatifnya estetika kota;</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masih rendahnya kualitas dan kuantitas pelayanan air bersih dan air limbah;</li> <li>2. Rendahnya Aksesibilitas dan Kapabilitas Infrastruktur Jalan;</li> <li>3. Banyaknya titik genangan/banjir di Kota Jambi;</li> <li>4. Belum terwujudnya harmonisasi ruang kota;</li> <li>5. Rendahnya rasio RTH public;</li> <li>6. Belum optimalnya manajemen pengelolaan sampah;</li> <li>7. Masih banyaknya bangunan liar dan tidak sesuai spesifikasi.</li> </ol> | DPUPR  |

| NO | URUSAN   | AKAR MASALAH  | MASALAH POKOK  | OPD                                 |
|----|--|---|--|-------------------------------------|
|    |  | 17. Banyaknya bangunan yang tidak memiliki Serti?kat Layak Fungsi (SLF);<br>18. masih rendahnya kualitas dan kuantitas pelayanan air bersih;<br>19. Rendahnya Aksesibilitas dan Kapabilitas Infrastruktur dan Keselamatan Jalan.  |  |                                     |
| 4. | Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman                    | 1. Rendahnya kualitas lingkungan permukiman;<br>2. Tingginya luasan kawasan kumuh;<br>3. Tingginya backlog perumahan;<br>4. Rendahnya kepedulian masyarakat terhadap lingkungan permukiman;<br>5. Rendahnya aksesibilitas masyarakat terhadap rumah layak huni;<br>6. Aksesibilitas Permukiman;<br>7. Banyaknya masyarakat yang tidak terlayani Fasum dan Fasos;<br>8. Masih banyak Fasum dan Fasos perumahan yang belum diserahkan;<br>9. Tingginya biaya pemakaman;<br>10. Masih banyaknya wilayah yang belum terlayani LPJU. | 1. Rendahnya kualitas lingkungan permukiman;<br>2. Masih banyaknya masyarakat yang belum memiliki rumah layak huni.  | DPRKP                               |
| 5. | Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat | 1. Rendahnya kenyamanan serta perlindungan masyarakat;<br>2. Lemahnya penegakan PERDA;<br>3. Rendahnya respon time penanganan bencana;<br>4. Kurangnya Jumlah Pejabat PPNS;<br>5. Masih minimnya sarana dan prasarana Satpol PP;<br>6. Kurangnya kesadaran Masyarakat dalam Mematuhi Perda;<br>7. Kurangnya pemahaman masyarakat akan bahaya kebakaran;<br>8. Minimnya sarana dan prasarana kebakaran di kecamatan.   | 1. Lemahnya penegakan PERDA;<br>2. Rendahnya <i>respon time</i> penanganan bencana;<br>3. Masih banyaknya kasus pelanggaran PERDA yang tidak memiliki ketetapan hukum (INKRACHT);<br>4. Tingginya potensi konflik. | SATPOL PP, DISDAMKAR DAN KESBANGPOL |
| 6. | Sosial   | 1. Tingginya Angka Penyandang PMKS;<br>2. Rendahnya keterampilan penduduk miskin;<br>3. Masih ditemuinya pengemis di jalan-jalan protokol;<br>4. Minimnya fasilitas bagi kaum lansia;<br>5. Tingginya penyalahgunaan Napza;   | Tingginya Angka Penyandang PMKS  | DINSOS                              |

| NO  | URUSAN                                       | AKAR MASALAH   | MASALAH POKOK   | OPD                       |
|-----|--|--|---|---------------------------|
|     |  | 6. Tingginya penduduk dibawah garis kemiskinan;<br>7. Tingginya kasus human trafficking.   |   |                           |
| 7.  | Tenaga Kerja                                 | 1. Rendahnya daya saing tenaga kerja;<br>2. Rendahnya kualitas tenaga kerja;<br>3. Tingginya angka pengangguran;<br>4. Rendahnya perlindungan terhadap tenaga kerja;<br>5. Belum optimalnya penyelesaian Konflik terhadap ketenagakerjaan;<br>6. Kurangnya tenaga pengawasan ketenagakerjaan;<br>7. Rendahnya penyerapan tenaga kerja lokal.   | Rendahnya daya saing tenaga kerja   | DTKK                      |
| 8.  | Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 1. Belum optimalnya peran serta perempuan di dalam pembangunan;<br>2. Tingginya angka ketimpangan gender;<br>3. Tingginya kasus kejahatan anak;<br>4. Rendahnya rasio pada tenaga kerja perempuan pada lapangan kerja;<br>5. Tingginya jumlah kejahatan perempuan;<br>6. Tingginya angka perceraian;<br>7. Tingginya kekerasan dalam rumah tangga;<br>8. Tingginya jumlah kejahatan anak;<br>9. Tingginya kasus pelecehan seksual terhadap anak. | 1. Belum optimalnya peran serta perempuan di dalam pembangunan;<br>2. Tingginya kasus kejahatan anak. | DPMPPA                    |
| 9.  | Pangan                                       | 1. Belum optimalnya ketahanan dan keamanan pangan;<br>2. Minimnya ketahanan pangan;<br>3. Rendahnya keamanan pangan;<br>4. Rendahnya diversifikasi pangan;<br>5. Banyaknya bahan pangan dalam kategori berbahaya;<br>6. Tidak adanya data bahan pangan layak dan aman dikonsumsi;<br>7. Rendahnya sarana dan prasarana keamanan pangan.  | Belum optimal pola pangan harapan di Kota Jambi   | DPKP                      |
| 10. | Pertanahan                                   | Banyaknya asset memiliki sertifikat pemda yang belum   | Banyaknya aset pemda yang belum memiliki sertifikat   | SETDA BAGIAN PEMERINTAHAN |
| 11. | Lingkungan Hidup                             | 1. Menurunnya kualitas Lingkungan Hidup;<br>2. Pembangunan tidak berwawasan lingkungan;  | 1. Menurunnya kualitas Lingkungan Hidup   | DLH                       |

| NO  | URUSAN   | AKAR MASALAH   | MASALAH POKOK   | OPD                  |
|-----|--|--|---|----------------------|
|     |  | 3. Tingginya pencemaran air;<br>4. Tingginya angka pencemaran limbah B3;<br>5. Belum optimalnya manajemen pengelolaan sampah;<br>6. Belum optimalnya dokumen perencanaan lingkungan hidup;<br>7. Kebijakan strategis dan kebijakan spasial tidak disertai dukungan KLHS;<br>8. Tingginya tingkat polusi (tanah, air dan udara);<br>9. Banyaknya limbah rumah tangga dan pelaku usaha dibuang ke saluran drainase;<br>10. Rendahnya kesadaran dan kepedulian masyarakat serta pelaku usaha terhadap pengelolaan limbah;<br>11. Belum optimalnya pemberian penghargaan lingkungan hidup kepada masyarakat;<br>12. Masih kurangnya SDM yang memiliki sertifikasi lingkungan hidup;<br>13. Kurangnya sapras untuk pengurangan dan pengelolaan sampah;<br>14. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah;<br>15. Rendahnya pengelolaan sampah ditingkat sumber. | 2. Belum optimalnya manajemen pengelolaan sampah                        |                      |
| 12. | Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 1. Tingginya jumlah penduduk diluar Kota Jambi yang tidak tercatat;<br>2. Belum adanya informasi kependudukan secara terbuka.  | Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik | DKPS                 |
| 13. | Pemberdayaan Masyarakat dan Desa               | 1. Belum optimalnya Pemberdayaan Masyarakat dalam perencanaan Pembangunan;<br>2. Belum optimalnya pembinaan kelembagaan swadaya masyarakat;<br>3. Belum optimalnya pengumpulan dan analisis data & informasi tentang partisipasi masyarakat dalam pembangunan di kelurahan.  | Belum optimalnya peran serta kepemudaan dalam pembangunan               | DPMPPA DAN KECAMATAN |
| 14. | Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana   | 1. Tingginya laju pertumbuhan penduduk;<br>2. Tingginya TFR.   | Tingginya laju pertumbuhan penduduk                                     | DPPKB                |

| NO  | URUSAN                             | AKAR MASALAH   | MASALAH POKOK   | OPD          |
|-----|------------------------------------|--|---|--------------|
| 15. | Perhubungan                        | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masih tingginya angka kecelakaan lalu lintas;</li> <li>2. Banyaknya kendaraan parkir dibadan jalan;</li> <li>3. Kurangnya lahan parkir;</li> <li>4. Belum adanya angkutan moda massal yang representatif;</li> <li>5. Rendahnya kesadaran pengguna jalan dalam berkendara;</li> <li>6. Masih kurangnya sarana dan prasarana keselamatan jalan.</li> </ol>  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masih tingginya angka pelanggaran lalu lintas;</li> <li>2. Minimnya kecepatan tempuh rata - rata (pada saat tertentu).</li> </ol> | DISHUB       |
| 16. | Komunikasi dan Informatika         | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lemahnya implementasi <i>smart city</i> dan <i>e-government</i>;</li> <li>2. Belum optimalnya pembentukan dan pengembangan jaringan kerjasama komunikasi dan informasi untuk mendukung penyampaian informasi kepada masyarakat;</li> <li>3. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data elektronik;</li> <li>4. Minimnya Sarana dan Prasarana TIK;</li> <li>5. Rendahnya jaringan internet di kantor pemerintahan;</li> <li>6. Rendahnya integrasi aplikasi pemerintahan;</li> <li>7. Rendahnya kualitas dan kuantitas SDM;</li> <li>8. Belum adanya peraturan pendukung <i>smart city</i>.</li> </ol> | Belum optimalnya implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)  | DISKOMINFO   |
| 17. | Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rendahnya manajemen koperasi;</li> <li>2. Rendahnya pengembangan koperasi;</li> <li>3. Rendahnya akses Koperasi terhadap sumber- sumber permodalan;</li> <li>4. Rendahnya kualitas SDM Koperasi;</li> <li>5. Rendahnya minat terhadap produk lokal;</li> <li>6. Rendahnya akses UMKM terhadap sumber- sumber permodalan;</li> <li>7. Rendahnya ketersediaan produk lokal di pasaran;</li> <li>8. Rendahnya kualitas SDM Koperasi dan UMKM;</li> <li>9. Rendahnya Kualitas Produk UMKM;</li> <li>10. Minimnya UMKM yang berdaya saing.</li> </ol>   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rendahnya manajemen koperasi;</li> <li>2. Rendahnya daya saing lokal</li> </ol>   | DTKK DAN DPP |
| 18. | Penanaman Modal                    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum optimalnya iklim investasi;</li> <li>2. Rendahnya minat investor untuk menanamkan modal;</li> </ol>  | Rendahnya kemandirian daerah terhadap dana perimbangan  | DPMPTSP      |

| NO  | URUSAN                  | AKAR MASALAH  | MASALAH POKOK   | OPD        |
|-----|-------------------------|---|---|------------|
|     |                         | 3. Belum optimalnya pelaksanaan promosi dan kerjasama penanaman modal;<br>4. Rendahnya kepastian hukum dalam berinvestasi;<br>5. Belum optimalnya pengawasan terhadap penanaman modal;<br>6. Belum optimalnya kerjasama pemerintah dan badan usaha;<br>7. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan perizinan;<br>8. Belum tersedianya data dan sistem informasi;                              |   |            |
| 19. | Kepemudaan dan Olahraga | 1. Belum optimalnya peran serta kepemudaan dalam pembangunan;<br>2. Rendahnya partisipasi pemuda dalam pembangunan;<br>3. Minimnya prestasi olahraga dikancah nasional;<br>4. rendahnya kepedulian pemuda dalam pembangunan;<br>5. Masih terbatasnya sarana dan prasarana kepemudaan;<br>6. Belum optimalnya pembinaan dan pengembangan kepemudaan;<br>7. Masih rendahnya minat generasi muda ikut dalam kepramukaan. | Belum optimalnya peran serta kepemudaan dalam pembangunan           | DISPORA    |
| 20. | Statistik               | 1. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data dalam pembangunan;<br>2. Rendahnya ketersediaan dan validitas data;<br>3. Kurangnya ketersediaan data pendukung ;<br>4. Belum tersedianya basis data yang valid dan <i>update</i> .  | Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data dalam pembangunan | DISKOMINFO |
| 21. | Persandian              | 1. Lemahnya pengamanan data dan informasi daerah;<br>2. Kurangnya sumber daya manusia yang memiliki keahlian khusus bidang persandian;<br>3. Masih banyaknya aplikasi informasi yang belum tersandikan.   | Lemahnya pengamanan data dan informasi daerah                       | DISKOMINFO |
| 22. | Kebudayaan              | 1. Tingginya degradasi terhadap nilai - nilai seni dan budaya;<br>2. Belum optimalnya dukungan sarana dan prasarana bidang kebudayaan dalam menunjang pelaksanaan kegiatan kebudayaan;<br>3. Belum optimalnya pelestarian terhadap seni dan budaya daerah;  | Tingginya degradasi terhadap nilai-nilai seni dan budaya            | DPK        |

| NO  | URUSAN                 | AKAR MASALAH   | MASALAH POKOK   | OPD  |
|-----|------------------------|--|---|------|
|     |                        | 4. Belum optimalnya pelestarian terhadap sejarah daerah;<br>5. Rendahnya pemahaman siswa terhadap kearifan lokal;<br>6. Semakin tergerus kearifan lokal dan nilai- nilai sejarah;<br>7. Minimnya Pengetahuan Masyarakat terhadap Sejarah Jambi;<br>8. Rendahnya Jumlah Cagar Budaya yang dilestarikan;<br>9. Rendahnya minat masyarakat terhadap museum daerah.  |   |      |
| 23. | Perpustakaan           | 1. Minimnya literasi masyarakat;<br>2. Rendahnya minat baca masyarakat;<br>3. Rendahnya budaya dan minat baca (pendidikan karakter);<br>4. Pergeseran paradigma dan budaya baca kearah digital;<br>5. Terbatasnya sarana dan prasarana perpustakaan daerah.  | Belum optimalnya daya saing pendidikan  | DPK  |
| 24. | Kearsipan              | 1. Belum optimalnya pengelolaan arsip pemerintah;<br>2. Belum optimalnya pembinaan kearsipan terhadap SDM kearsipan;<br>3. Belum memadainya sarana prasarana kearsipan pada setiap Perangkat Daerah ditunjukkan persentase perangkat daerah yang telah menerapkan manajemen arsip secara lebih efektif.  | Belum optimalnya pengelolaan arsip  | DKP  |
| 25. | Kelautan dan Perikanan | 1. Rendahnya daya saing produk perikanan;<br>2. Rendahnya produktivitas perikanan;<br>3. Rendahnya kualitas lingkungan perairan;<br>4. Menurunnya biodiversitas spesies perikanan;<br>5. Belum optimalnya penggunaan teknologi perikanan.  | Belum optimalnya pengendalian ketersediaan dan distribusi pangan              | DKPP |
| 26. | Pariwisata             | 1. Rendahnya kunjungan wisata melalui dan ke Kota Jambi;<br>2. Rendahnya pembinaan, koordinasi dan sinergi antar stakeholders kepariwisataan;<br>3. Rendahnya aktivitas kepariwisataan;<br>4. Rendahnya kreativitas dalam pengelolaan kepariwisataan;<br>5. Belum adanya pemanfaatan HAKI dalam pengembangan ekonomi kreatif;<br>6. Belum terpetanya potensi sumber daya pariwisata;<br>7. Minimnya sarana dan prasarana kepariwisataan. | Rendahnya pembinaan, koordinasi dan sinergi antar stakeholders kepariwisataan | DPK  |
| 27. | Pertanian              | 1. Belum optimalnya pengelolaan hewan peliharaan;  | Belum optimalnya pengendalian ketersediaan dan distribusi pangan              | DKPP |



| NO  | URUSAN                  | AKAR MASALAH   | MASALAH POKOK  | OPD     |
|-----|-------------------------|--|--|---------|
|     |                         | 2. Minimnya keamanan daging konsumsi secara Aman, Sehat, Unggul dan Halal;<br>3. Minimnya sarana dan prasarana RPH sesuai SNI;<br>4. Rendahnya pemeriksaan terhadap kesmavet.  |  |         |
| 28. | Perdagangan             | 1. Rendahnya kualitas pengelolaan sarana prasarana perdagangan;<br>2. Tingginya Biaya Logistik;<br>3. Tingginya fluktuasi harga;<br>4. Tidak adanya data surplus dan defisit;<br>5. Tingginya oligopoli komoditi;<br>6. Belum optimalnya informasi pasokan, harga dan akses pangan daerah;<br>7. Rendahnya transaksi di pasar induk dan rakyat;<br>8. Belum optimalnya pelaksanaan pembinaan terhadap pedagang;<br>9. Minimnya pasar rakyat sesuai SNI;<br>10. Tingginya tingkat kecurangan transaksi pasar. | 1. Lemahnya tata niaga perdagangan;<br>2. Masih lemahnya manajemen perpasaran. | DPP     |
| 29. | Perindustrian           | 1. Belum optimalnya pembinaan pemerintah terhadap industri kecil dan menengah;<br>2. Rendahnya ketersediaan bahan baku di pasaran;<br>3. Rendahnya Kualitas Produk Industri yang dihasilkan;<br>4. Rendahnya daya saing produk industri IKM;<br>5. Rendahnya kemampuan IKM dalam manajemen, akses permodalan dan penggunaan IT.  | Rendahnya daya saing produk industri IKM                                       | DPP     |
| 30. | Perencanaan Pembangunan | 1. Kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah belum optimal, disebabkan kurangnya kapasitas SDM perencana;<br>2. Banyaknya amanat pemerintah untuk menyusun dokumen perencanaan multisektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terbaru yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah;<br>3. Rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan;   | Belum optimalnya perumusan kebijakan dalam proses pembangunan                  | BAPPEDA |

| NO  | URUSAN                      | AKAR MASALAH   | MASALAH POKOK   | OPD             |
|-----|-----------------------------|--|---|-----------------|
|     |                             | 4. Kurangnya ketersediaan data dan informasi untuk menunjang perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas;<br>5. Belum maksimalnya fungsi monitoring dan evaluasi terhadap perencanaan yang telah dilaksanakan;<br>6. Belum terintegrasinya sistem perencanaan dengan sistem keuangan.  |   |                 |
| 31. | Keuangan                    | 1. Belum optimalnya pendapatan asli daerah khususnya yang bersumber dari pajak dan retribusi daerah terlihat dari persentase besaran PAD terhadap seluruh pendapatan dalam APBD;<br>2. Belum optimalnya Tertib dan akuntabilitas keuangan daerah;<br>3. Rendahnya kemandirian daerah terhadap dana perimbangan;<br>4. Belum optimalnya kualitas manajemen pengelolaan keuangan dan aset daerah berbasis accrual;<br>5. Belum optimalnya pendapatan daerah;<br>6. Belum terintegrasinya sistem keuangan dengan perencanaan. | 1. Rendahnya kemandirian daerah terhadap dana perimbangan;<br>2. Belum optimalnya pengelolaan keuangan dan aset daerah. | BPKAD DAN BPPRD |
| 32. | Penelitian dan Pengembangan | 1. Masih minimnya produk penelitian yang mendukung terhadap penyusunan dokumen perencanaan pembangunan;<br>2. Masih minimnya produk penelitian yang menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan;<br>3. Masih minimnya kegiatan pengembangan yang mendukung inovasi produk-produk kreatif dalam rangka pengembangan perekonomian.   | Belum optimalnya produk penelitian didalam perumusan kebijakan  | BAPPEDA         |
| 33. | Kepegawaian                 | 1. Belum optimalnya reformasi birokrasi;<br>2. Masih belum optimalnya pembinaan disiplin dan terdapat ASN yang tidak disiplin di setiap unit kerja PD;<br>3. Belum optimalnya kompetensi ASN yang sesuai dengan unit kerja Perangkat Daerah;<br>4. Jumlah ASN yang pensiun lebih besar daripada pengangkatan ASN baru, terutama memenuhi kebutuhan   | Belum optimalnya kompetensi ASN yang sesuai dengan unit kerja Perangkat Daerah  | BKPSDMD         |

| NO  | URUSAN             | AKAR MASALAH  | MASALAH POKOK   | OPD               |
|-----|--------------------|---|---|-------------------|
|     |                    | tenaga teknis, tenaga pendidikan, tenaga kesehatan dan tenaga fungsional tertentu.  |   |                   |
| 34. | Sekretariat Daerah | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masih rendahnya PD yang mampu menyusun laporan kinerja instansi pemerintah (LKjIP) yang dihasilkan sesuai dengan peraturan yang berlaku;</li> <li>2. Masih rendahnya produk hukum daerah yang tersosialisasikan;</li> <li>3. Masih belum optimalnya capaian Nilai Survei Kepuasan Masyarakat dalam pelayanan publik.</li> </ol> | Belum Optimalnya Akuntabilitas Pemerintahan                   | SETDA             |
| 35. | Sekretariat Dewan  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masih terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM;</li> <li>2. Belum optimalnya kinerja pelaksanaan fungsi-fungsi DPRD.</li> </ol>   | Belum optimalnya  | SEKRETARIAT DEWAN |
| 36. | Pengawasan         | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rendahnya pengawasan dan pengendalian tata kelola pemerintahan;</li> <li>2. Masih rendahnya capaian penilaian pelaksanaan reformasi birokrasi;</li> <li>3. Masih rendahnya level kapabilitas APIP.</li> </ol>   | Belum optimalnya Sinergitas penyelenggaraan pemerintah daerah | INSPEKTORAT       |

#### **4.2. Isu Strategis**

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah dan panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang.

Perumusan permasalahan pembangunan daerah dan analisis isu strategis merupakan dasar untuk merumuskan tujuan dan sasaran pembangunan daerah dimasa datang. Oleh karena pentingnya proses perumusan permasalahan dan analisis isu strategis terhadap arah pembangunan yang akan ditentukan, maka untuk menjamin konsistensi dan sinergitas pembangunan antar wilayah dan antara pusat dan daerah maka perlu memperhatikan isu strategis kota, provinsi, nasional bahkan dunia internasional dalam proses perumusannya.

Fungsi keselarasan dan keterlibatan nasional dan provinsi ialah untuk menjelaskan permasalahan dan isu nasional dan provinsi yang ada di daerah, maupun sebaliknya untuk memberikan masukan permasalahan dan isu yang ada di daerah kepada provinsi. Isu strategis dapat berasal dari permasalahan pembangunan yang dianggap paling prioritas untuk diselesaikan maupun isu dari dunia internasional, nasional maupun regional.

Berdasarkan permasalahan yang perlu penanganan prioritas dan memperhatikan isu strategis di provinsi, nasional serta internasional, maka isu strategis yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah Kota Jambi 5 tahun kedepan adalah sebagai berikut:

##### **1. Kualitas sumber daya manusia dan pelayanan dasar**

Kualitas sumber daya manusia dan pelayanan dasar menjadi isu strategis yang dititikberatkan pada kondisi kualitas hidup masyarakat terutama pada isu - isu yang menyangkut urusan pendidikan, kesehatan, sosial, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta keterampilan dan keahlian tenaga kerja. Hal ini disebabkan masih belum optimalnya capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM), baik indeks pendidikan maupun indeks kesehatan, masih rendahnya angka rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah, belum optimalnya capaian angka harapan hidup, masih cukup tingginya angka kematian ibu dan bayi dan masih ditemukannya kasus balita gizi buruk, belum optimalnya pengendalian penyakit menular dan tidak menular, belum optimalnya pelayanan kesehatan dan jaminan kesehatan, dan belum optimalnya pelayanan

KB yang menyebabkan angka kelahiran total masih belum optimal, serta masih belum optimalnya penanganan PMKS terutama yang berada diluar panti.

**2. Penanggulangan kemiskinan**

Penanggulangan kemiskinan masih menjadi isu strategis yang perlu segera ditangani dan mendapat perhatian khusus. Hal ini ditandai dengan masih tingginya angka kemiskinan dan angka pengangguran serta jumlah Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I, masih rendahnya tingkat partisipasi angkatan kerja.

**3. Infrastruktur publik, permukiman dan lingkungan hidup**

Infrastruktur publik, permukiman dan lingkungan hidup merupakan isu strategis yang perlu mendapat perhatian. Hal ini ditandai dengan masih luasnya kawasan permukiman kumuh, masih banyaknya rumah tidak layak huni, belum optimalnya capaian rumah tangga bersanitasi seperti kurangnya ketersediaan layanan air minum perpipaan, pengelolaan limbah, dan penanganan sampah, terbatasnya ruang terbuka hijau dan ruang-ruang publik/taman-taman kota, masih terdapat genangan air saat musim hujan, belum optimalnya penataan trotoar dan jaringan drainase, menurunnya kapasitas badan air penerima limpasan air hujan, masih terbatasnya ketersediaan fasilitas pendukung lalu lintas, belum optimalnya manajemen rekayasa lalu lintas, dan belum optimalnya cakupan layanan angkutan umum.

**4. Pertumbuhan dan pemerataan ekonomi serta daya beli masyarakat**

Pertumbuhan dan pemerataan perekonomian serta daya beli masyarakat menjadi isu strategis yang perlu mendapat perhatian dan prioritas. Hal ini ditandai dengan masih kurang optimalnya kontribusi kategori unggulan terhadap pertumbuhan PDRB, masih rendahnya PDRB per kapita dan daya beli masyarakat dan masih tingginya kontribusi bahan makanan terhadap laju inflasi, masih tingginya rasio gini atau kesenjangan pendapatan masyarakat, belum optimalnya nilai investasi daerah dan kunjungan wisatawan yang masuk, kurangnya jumlah pelaku wirausaha, kurangnya daya saing dan kemandirian para pelaku usaha mikro dan kecil, pemasaran dan akses terhadap permodalan, serta belum memadainya sarana dan prasarana perdagangan. Hal ini ditambah lagi dengan dampak pandemi covid 19, yang tidak dapat dipungkiri bahwa pandemi ini membawa efek yang sangat besar dalam kehidupan masyarakat dan terjadinya resesi yang menyebabkan ekonomi menjadi lesu, hal ini berdampak pada daya beli masyarakat melemah, penghasilan merosot, rendahnya tingkat konsumsi,

investasi tidak bergairah, hingga gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK).

**5. Tata nilai kehidupan masyarakat dan kebudayaan daerah**

Tata nilai kehidupan masyarakat yang menyangkut kehidupan masyarakat dalam beragama, moral, akhlak, karakter dan kearifan lokal menjadi isu strategis yang menjadi prioritas, hal ini disebabkan dengan masih rendahnya implementasi perda tata nilai kehidupan masyarakat yang religius, menurunnya moral, akhlak dan karakter masyarakat, rentannya kehidupan masyarakat akan konflik, toleransi beragama, berbangsa dan bernegara, masih adanya pelanggaran dan gangguan ketentraman dan ketertiban umum, masih terbatasnya sarana dan prasarana seni dan budaya, belum optimalnya pembinaan, apresiasi dan pelestarian terhadap seni dan budaya.

**6. Pengarusutamaan gender dan ketahanan keluarga**

Pengarusutamaan gender dan ketahanan keluarga menjadi isu strategis yang mendapat perhatian. Hal ini ditandai dengan belum optimalnya capaian Indeks Pembangunan dan Pemberdayaan Gender, masih cukup tingginya kasus kekerasan dan eksploitasi terhadap perempuan dan anak, belum optimal dan memadainya perlindungan dan ketersediaan sarana prasarana publik yang ramah perempuan dan anak, serta optimalisasi pengendalian penduduk

**7. Tata kelola pemerintahan yang profesional, efektif, efisien, transparan dan akuntabel serta berbasis teknologi informasi**

Tata kelola pemerintahan yang profesional, efektif, efisien, transparan dan akuntabel menjadi isu strategis, yang ditandai oleh masih kurangnya tingkat disiplin pegawai, belum optimalnya pengelolaan keuangan daerah dan kinerja aparatur, belum optimalnya kualitas layanan publik dan akuntabilitas instansi pemerintah, masih terdapat beberapa gedung kantor perangkat daerah yang belum representatif, masih belum optimalnya implementasi e-government pada seluruh perangkat daerah dan pelayanan publik.